

STUDI TENTANG PERKEMBANGAN DAN PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

Widuri Hidayanti¹

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan di wilayah perbatasan khususnya wilayah perbatasan bagian Barat Propinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Apari yang masih minim akan pembangunan sarana dan prasarana. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan wilayah perbatasan Kalimantan Timur di Kecamatan Long Apari serta perkembangan dan penanganan sarana prasarana di wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan wilayah perbatasan antar propinsi dan antar Negara di Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Setelah mengetahui perkembangan dan penanganan yang terjadi, maka akan dibuat menjadi suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan penanganan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang belum terjadi perkembangan dan penanganan yang signifikan. Seperti halnya pada sarana transportasi sudah relatif ada perkembangan namun penanganan yang lebih serius belum terealisasi, sarana komunikasi sudah ada perkembangan namun penanganannya belum dilakukan secara maksimal, perkembangan dan penanganan pada pendidikan sudah relatif ada peningkatan serta keinginan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga semakin meningkat namun akses yang jauh dan biaya yang mahal masih menjadi kendalanya, sarana kesehatan sudah ada perkembangan namun pada penanganannya belum dilakukan secara maksimal, pembangunan sumber daya manusia sudah ada perkembangan namun pada penanganannya masih belum maksimal dan belum mendapat perhatian yang lebih intensif.

Kata Kunci: *Perkembangan, penanganan, wilayah perbatasan, Kalimantan Timur, Long Apari.*

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan Negara memiliki nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan, mendorong perkembangan ekonomi dan sosial budaya sehingga saling mempengaruhi antara Negara yang akan berdampak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: h.widuri@yahoo.co.id

pada strategi keamanan dan pertahanan Negara. Mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara "wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara dengan Negara lain. Dalam hal batas wilayah Negara di darat, wilayah perbatasan berada pada suatu wilayah administratif kecamatan". Setelah pemekaran wilayah Propinsi Kalimantan Timur dengan dibentuknya Propinsi Kalimantan Utara, maka satu-satunya wilayah perbatasan Negara yang ada di Propinsi Kalimantan Timur saat ini berada di Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Apari.

Jika dilihat dalam pembangunan wilayah perbatasan sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan, beberapa diantaranya yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dengan pedalaman/perbatasan, masalah ketenaga kerjaan serta masalah lingkungan. Kecamatan Long Apari merupakan wilayah yang berbatasan langsung secara daratan dengan Serawak bagian Timur Negara Malaysia. Keadaannya masih sama seperti wilayah perbatasan lain di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur belum memadai, akses masih sulit dan sarana komunikasi belum tersedia secara maksimal, sehingga 10 desa yang berada di Kecamatan Long Apari merasa di anak tirikan oleh pemerintah Indonesia dan sempat ingin bergabung dengan Negara Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Long Pananeh I, Batoq Laga "Kami sudah kemana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur hingga ke pemerintah pusat. Tapi hasilnya nihil, kami masih saja di kucilkan. Jika pemerintah tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, maka dipastikan 10 Desa di Kecamatan Long Apari akan memasang bendera Malaysia" (<http://Www.Kompas.com>, diakses Januari 2015).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana sejarah perkembangan wilayah perbatasan Kalimantan Timur? *Kedua*, bagaimana sejarah perkembangan wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari? *ketiga*, bagaimana perkembangan dan penanganan wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari? dan *keempat*, bagaimana tanggapan atau respon terhadap perkembangan dan penanganan wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari?

Kerangka Dasar Teori

Wilayah Perbatasan

Istilah "perbatasan" memiliki dua cakupan pengertian. Dalam bahasa Inggris perbatasan disebut sebagai *boundaries* dan *frontiers*. Seperti yang dijelaskan oleh Hornby, Cowie dan Gimson (1986) (dalam Suroyo, 2005) dalam lingkup yang pertama, perbatasan adalah garis demarkasi yang memisahkan wilayah antar Negara. Dalam lingkup yang kedua *frontier* sering digunakan sebagai padanan istilah perbatasan yang sebenarnya lebih merujuk pada jalur (*zones*) yang membentang dan memisahkan 2 wilayah Negara.

Perkembangan

Makna kata dari perkembangan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) yaitu dari kata dasar per-kem-bang-an adalah sesuatu atau perihal berkembang. Sedangkan makna dari berkembang itu sendiri adalah mekar terbuka, membentang, bahkan meningkat dan bertambah. Disimpulkan yang dimaksud dengan perkembangan wilayah perbatasan yaitu adanya suatu perubahan kondisi di wilayah perbatasan yang mengarah kepada peningkatan.

Penanganan Wilayah Perbatasan

Arti dari kata penanganan seperti yang telah dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) berasal dari kata dasar pe-na-ngan-an yaitu suatu proses atau cara. Penanganan wilayah perbatasan yakni suatu cara atau proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di wilayah perbatasan melalui upaya pengelolaan ataupun pembangunan yang mengarah kepada perkembangan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

Metodelogi Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan mengkaji tentang perkembangan dan penanganan wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Karena telah terjadi beberapa kali pemekaran wilayah maka kini hanya ada 1 kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Negara Malaysia. Penulis melihat sejarah perkembangan wilayah perbatasan Kalimantan Timur secara umum melalui data yang ada, kemudian melakukan penelitian langsung ke lokasi wilayah perbatasan Kalimantan Timur di Kecamatan Long Apari.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model alir yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Sejarah Perkembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur

Pada zaman dahulu ada beberapa kerajaan yang berada di wilayah Kalimantan Timur, diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Karta Negara ing Martadipura, Kesultanan Paser dan Kesultanan Bulungan. Tahun 1620-1624 Negeri yang berada di wilayah Kalimantan bagian Timur ini menjadi pengaruh Sultan Alaudin dari kesultanan Makassar. Pada tahun 1846 wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian dari Hindia Belanda. Tahun 1900 Kalimantan Timur merupakan bagian dari wilayah dependensi, kemudian dalam tahun 1902 wilayah Kalimantan Timur merupakan *Afdelling Koetei en Noord-oost Kust van Borneo*, pada tahun 1942 wilayah Kalimantan Timur merupakan *Afdelling Samarinda dan Afdelling Boeloengan en Berauoe*. Sebelum pemekaran wilayah, Kalimantan Timur merupakan salah satu keresidenan dari Propinsi Kalimantan. Perkembangan dimulai sejak tahun 1956 sesuai dengan aspirasi rakyat wilayah Kalimantan dimekarkan menjadi 4 propinsi, salah satunya Propinsi Kalimantan Timur dengan gubernur pertamanya yaitu APT. Pranoto.

Sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan, maka pemekaran wilayah kembali dilakukan khususnya pada wilayah yang memiliki karaktersitik berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Berdasar pada disahkannya UU DOB pada 14 Desember 2012, maka dimekarkan Propinsi Kalimantan Timur dengan dibentuknya Propinsi Kalimantan Utara yang kemudian menyusul di tahun 2013 dibentuknya wilayah administrasi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Kutai Barat. Jika dahulunya wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia meliputi 3 kabupaten, 12 kecamatan dan 249 desa, maka kini hanya ada 1 kabupaten, 1 kecamatan yang meliputi 10 desa. Selain itu dalam mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah juga membangun sarana transportasi dan telekomunikasi yang dianggap sebagai urat nadi dalam kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan, meski dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Sejarah Perkembangan Wilayah Perbatasan Kecamatan Long Apari

Wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari dengan Serawak Malaysia dahulunya merupakan hutan dan belum ada kegiatan pembangunan, masyarakatnya juga masih hidup secara berpencar dengan mendiami goa-goa. Di wilayah perbatasan akan selalu ada historis masyarakat diantara kedua Negara, seperti halnya di wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari dengan Long Sengot Serawak Malaysia. Pada zaman dahulu sempat terjadi konflik antara masyarakat di wilayah perbatasan Long Sengot Malaysia dengan Long Apari Indonesia. Konflik terjadi akibat adanya dendam dan perebutan wilayah, walaupun sempat terjadi konflik setelah berdamai masyarakat hidup secara rukun bahkan banyak dari masyarakat Long Apari yang bekerja dan tinggal menetap di Long Sengot. Masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan ini pada zaman dahulu bahkan tidak

menyadari bahwa adanya wilayah administratif Negara yang memisahkan antara Long Apari dengan Long Sengot.

Setelah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia maka dibentuklah beberapa desa di wilayah perbatasan yang dahulunya masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat. Setelah adanya pemekaran wilayah kecamatan dan kabupaten, maka kini wilayah perbatasan Long Apari dibentuk menjadi wilayah administratif Kecamatan Long Apari yang sekarang merupakan bagian dari wilayah adminisitratif Kabupaten Mahakam Ulu..

Perkembangan dan Penanganan Wilayah Perbatasan Kecamatan Long Apari, meliputi:

1. *Transportasi*

Karena belum memiliki jalur darat, maka sarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah masih mengandalkan sarana transportasi air. Akses darat untuk menuju Ibu Kota Kabupaten masih belum tersedia, berbeda dengan akses darat menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang bisa diakses meski kondisi jalan masih berupa tanah. Jarak tempuh rata-rata dari desa ke Ibu Kota Kabupaten Ujoh Bilang sekitar 540 Km dengan Desa terjauh berada di Desa Long Apari sebagai desa tempat penyinggahan perahu ketika menuju patok batas Negara. Jika dahulu masyarakat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu dengan berdayung, maka kini masyarakat sudah menggunakan mesin sebagai alat penggerak perahu. Desa Long Apari masih berjarak sekitar 40 Km dari patok batas dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hari. Mengingat letak imigrasi Malaysia yang berada di Kapit dan berjarak tempuh kurang lebih sama dengan jarak tempuh dari Desa Long Apari ke patok batas Negara Indonesia, maka wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak Malaysia ini masih tidak efisien pada pengawasan dan kegiatan keimigrasiannya. Meski sarana transportasi darat belum tersedia, tetapi pemerintah sudah melakukan penanganan mulai dengan dibangunnya landasan pacu pesawat di Desa Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai sebagai upaya untuk membuka keterisolasian di wilayah perbatasan Mahakam Ulu, pembangunan dermaga sebagai tempat penyinggahan perahu, semenisasi jalan di dalam desa dan pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa meski belum semua desa terhubung.

2. *Sarana Komunikasi*

Pada zaman dahulu masyarakat di wilayah perbatasan Long Apari belum memiliki media komunikasi apapun, setelah mengenal angka dan huruf masyarakat menjadikan surat sebagai media komunikasi dengan jarak jauh. Ditahun 2005 kemudian masyarakat menggunakan warung telepon sebagai sarana komunikasi yang disediakan oleh pihak swasta. Setelah mendapat

perhatian dari pemerintah pada sarana komunikasi maka ditahun 2012 dibangun 2 buah tower BTS di Desa Tiong Ohang dan Desa Long Apari, sehingga kini masyarakat sudah menggunakan hand phone sebagai sarana komunikasi meski dalam penggunaannya belum bisa digunakan secara maksimal. Satu buah tower berkapasitas 200 penelpon dengan area tangkap yang tidak terlalu luas, menanggapi hal tersebut pemerintah memprogramkan pengembangan jaringan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan menambah tower BTS pada titik tertentu meliputi daerah patok batas Negara, Desa Noha Silat serta penambahan kapasitas jaringan pada tower BTS di Desa Tiong Ohang.

3. Pendidikan

Pada masa penjajahan masyarakat telah diajarkan sempoa oleh orang-orang Belanda. Sekitar tahun 1960 masyarakat di perbatasan belajar pada yayasan Khatolik yang didirikan oleh pastor. Setelah merdeka, penanganan pemerintah pada pendidikan mulai dilakukan sejak tahun 1979 dengan dibangunnya Sekolah Dasar, kemudian menyusul dibangunnya Sekolah Menengah Pertama ditahun 1986 dan Sekolah Menengah Atas di tahun 2004. Prasarana pendidikan guru dan murid sudah bisa dikatakan cukup dengan kondisi bangunan sekolah yang masih bagus. Selain pada sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga sudah meningkat, dibuktikan dari beberapa masyarakat yang melanjutkan sekolah ke tahap perguruan tinggi. Tetapi karena aksesnya yang sulit dan jauh maka akan dibutuhkan biaya besar ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga masih banyak dari masyarakat yang belum bisa melanjutkan sekolah ke tahap perguruan tinggi.

4. Kesehatan

Sebelum dibangunnya sarana pengobatan secara modern masyarakat di Kecamatan Long Apari hanya menggunakan media pengobatan secara tradisional dengan memanfaatkan ramuan obat disekitar dan bermodalkan pengetahuan dari nenek moyang atau melakukan sembur-sembur pada dukun kampung. Ditahun 1966 masyarakat mulai melakukan pengobatan secara modern pada poliklinik dari yayasan Khatolik. Menangani kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari, maka ditahun 1983 hingga tahun 2014 pemerintah sudah membangun sarana kesehatan berupa 1 puskesmas induk, 6 puskesmas pembantu, 1 balai pengobatan dan 1 klinik dokter. Tetapi hingga saat ini Kecamatan Long Apari masih mengalami kekurangan tenaga medis yaitu perawat dan dokter. Sarana dan prasarana medis juga masih terbatas, sehingga ketika ada masyarakat yang sakit cukup parah masih harus dirujuk ke Rumah Sakit Sendawar di Ibu Kota

Kabupaten Kutai Barat. Padahal akses untuk menuju Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat tersebut sangat jauh dengan biaya yang tidak murah.

5. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*

Kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Long Apari

Ditahun 1999 hingga 2000 hanya ada 1 orang PNS di Kecamatan Long Apari yaitu camat. Ditahun 2000 hingga tahun 2014 meningkat menjadi 35 orang PNS yang meliputi staff kecamatan dan aparatur desa. Kualitas pendidikan aparatur pemerintah di Kecamatan Long Apari sudah relatif baik, meski sebagian aparatur pemerintah masih tamatan SMA namun beberapa diantaranya sudah ada yang lulusan DIII bahkan S1.

Kondisi bangunan tempat tinggal atau perumahan masyarakat

Jika pada zaman dahulu orang-orang yang ada di wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari tinggal dengan mendiami goa-goa, sekitar tahun 1930 masyarakat sudah membangun rumah dengan peralatan seadanya dan mulai tahun 1970 pembangunan rumah secara modern mulai dilakukan. Sebagian besar bangunan rumah penduduk masih berupa semi permanen dan masih banyak juga yang non permanen, hanya ada sekitar 10% rumah penduduk yang merupakan bangunan permanen. Perumahan merupakan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah.

Lapangan pekerjaan, sarana keagamaan, pasar dan pertokoan, perbankan, sarana listrik dan dan olah raga

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat berkebun kakao, kopi dan karet serta bertani padi atau ladang dengan hasil produksi masih terbatas. Karena kegiatan usaha yang dilakukan secara tradisional dan bergantung dengan kondisi alam maka penghasilan yang didapat tiap bulannya tidak menentu. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai umat beragama pemerintah telah membangun sarana ibadah berupa rumah ibadah yaitu 4 gereja khatolik, 1 gereja protestan dan 1 masjid. Keberadaan pertokoan sudah ada sejak tahun 2000 berada di Desa Long Keriok, Desa Tiong Bu'u dan Desa Tiong Ohang. Sarana jasa perbankan telah dibangun di tahun 2014 yang aktif beroperasi di tahun 2015. Fasilitas listrik hanya dimiliki oleh masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi. Hingga saat ini belum ada penanganan yang terealisasi dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana listrik masyarakat. Saat ini Kecamatan Long Apari memiliki 3 jenis sarana olah raga berupa lapangan voli, sepak bola dan bulu tangkis, sarana tersebut dibangun atas aspirasi masyarakat dari anggaran dana desa.

Pengelolaan potensi-potensi daerah

Karena potensi wilayah yang dimiliki dan berdasar pada penetapan fungsi wilayah Kecamatan Long Apari, maka sektor-sektor yang akan mendapat prioritas pengembangan adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan wilayah wisata. Tapi hingga saat ini belum dilakukan pengelolaan sehingga belum nampak positif sebagai potensi yang prospektif untuk dikembangkan

Tanggapan atau respon terhadap perkembangan dan penanganan wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari

Wawancara dilakukan mulai dari aparaturnya pemerintahan pada tingkat kabupaten dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Mahakam Ulu dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, pada tingkat kecamatan wawancara dilakukan dengan Camat Long Apari, hingga masyarakat di Kecamatan Long Apari. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Mahakam Ulu Evodius Awang mengatakan “Walaupun Kabupaten Mahakam Ulu saat itu masih berusia 1 tahun namun beberapa kegiatan dari pendanaan APBN dan APBD tingkat I propinsi sudah turun ke lapangan sehingga pada perkembangannya seperti pada kondisi pendidikan dan sarana komunikasi kini sudah ada peningkatan. Pada penanganannya memang belum dapat dilakukan secara spontan mengingat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai DOB dan masih ada kendala dalam pembangunannya” (wawancara, 09 April 2015). Kemudian wawancara dilakukan dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Harun Al Rasyid, Ia mengatakan “Merubah orientasi wilayah perbatasan dari halaman belakang menjadi halaman depan memang bukan hal yang mudah mengingat ketertinggalan sudah begitu jauh dibanding dengan wilayah di perkotaan. Akses yang masih sulit menyebabkan penanganan belum bisa dilakukan secara maksimal, meski penanganan di Kecamatan Long Apari belum bisa dilakukan secara maksimal namun pada perkembangannya sejauh ini sudah relatif ada peningkatan khususnya pada sarana dan prasarana sosial” (wawancara , 09 April 2015). Camat Long Apari Ignatus Ledok Lawa mengatakan “Sejauh ini perkembangan pada kebutuhan dasar masyarakat sudah relatif terpenuhi walaupun peningkatannya masih lambat. Lambatnya perkembangan tersebut disebabkan oleh penanganan yang masih terkendala pada berbagai aspek meliputi kebutuhan jalan penghubung, aparat pemerintahan yang berkompeten dan ekonomi” (wawancara, 06 April 2015). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 5 orang masyarakat maka disimpulkan, menurut masyarakat perkembangan wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari sudah ada perkembangan meskipun lambat, dalam hal penanganannya mereka

mengatakan masih dirasa lambat, pemerintah kurang tanggap dan pembangunan masih kurang maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dilihat dari sejarah Kalimantan Timur dahulunya adalah wilayah-wilayah kerajaan dan kemudian merupakan keresidenan dari Propinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi masyarakat kemudian dibentuk Propinsi Kalimantan Timur. Setelah diadakan beberapa kali pemekaran wilayah, kini wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Serawak Malaysia hanya berada di Mahakam Ulu. Selain membentuk wilayah administratif, untuk menangani pembangunan di wilayah perbatasan program pembangunan infrastruktur jalan dan telekomunikasi terlebih dahulu mendapat perhatian sebab dianggap sebagai urat nadi dalam kegiatan pembangunan, namun pada pelaksanaannya pembangunan kedua infrastruktur tersebut belum dilakukan secara maksimal.
2. Berbicara sejarah Kecamatan Long Apari dahulunya wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini hanya berupa hutan dan belum ada kegiatan pembangunan. Masyarakat hidup secara berpencar dengan mendiami goa-goa. Pada zaman dahulu sempat terjadi perang suku antara orang-orang yang mendiami kedua wilayah perbatasan tersebut, walaupun pernah terjadi konflik namun setelah berdamai banyak orang-orang Indonesia yang tinggal menetap di Malaysia. Dizaman dahulu masyarakat bahkan tidak pernah tahu bahwa adanya wilayah administratif Negara yang memisahkan antara Long Apari dengan Long Sengot. Setelah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia dibentuklah wilayah administratif desa dan kecamatan serta pembangunan infrastruktur pada wilayah perbatasan Long Apari.
3. Perkembangan wilayah perbatasan Kecamatan Long Apari hingga saat ini masih lambat dan penanganan yang dilakukan juga masih lambat. Seperti pada sarana dan prasarana dasar, meliputi pada sarana transportasi sudah relatif ada perkembangan sejak tahun 1970 namun pada penanganan yang lebih serius belum dilakukan, sarana komunikasi sudah ada perkembangan sejak tahun 1960 namun pada penanganannya belum dilakukan secara maksimal, perkembangan dalam hal pendidikan sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda sekitar kurang dari tahun 1909 dan bahkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan kini sudah meningkat namun masyarakat masih terkendala biaya ketika akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi sebab akses wilayah perbatasan yang sangat jauh dan sulit dijangkau, sarana kesehatan sudah ada perkembangan sejak tahun 1966 namun pada penanganannya hingga kini belum dilakukan secara maksimal, perkembangan sumber daya manusia sudah relatif ada peningkatan namun pada penanganannya belum mendapat perhatian yang lebih intensif pada tiap aspeknya dan penanganan yang dilakukan masih lambat.

4. Tanggapan masyarakat Kecamatan Long Apari terhadap perkembangan wilayah mereka sejauh ini sudah relatif ada peningkatan meskipun lambat. Dalam hal penanganannya mereka mengatakan masih dirasa lambat dan pembangunan masih kurang maksimal. Merespon tanggapan masyarakat, pemerintah mengatakan bahwa penanganan belum dapat dilakukan secara spontan sebab masih ada beberapa kendala diantaranya Mahakam Ulu masih merupakan DOB dengan akses yang masih sulit. Tapi kebijakan untuk memperbaharui wilayah perbatasan akan diposisikan sebagai kebijakan khusus dan diprioritaskan.

Saran

1. Mengingat dahulunya Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia yang meliputi 3 kabupaten sedangkan kini hanya ada 1 kabupaten, maka sudah semestinya penanganan dilakukan secara fokus dan intensif. Agar pembangunan dapat dilakukan dengan cepat sambil menunggu terealisanya pembangunan jalan darat disarankan agar disediakan sarana transportasi air yang mampu mengangkut kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Apari, misalnya speed boat dari pemerintah atau kapal dari pemerintah untuk membawa segala peralatan logistik ke Kecamatan Long Apari.
2. Mengingat tingginya kontak sosial yang terjadi antara masyarakat Long Apari dengan Long Sengot Serawak Malaysia, maka untuk menghindari terjadinya pelanggaran pada lintas batas Negara disarankan agar pembangunan pos-pos lintas batas dan kegiatan keimigrasian lebih ditingkatkan lagi.
3. Karena perkembangan dan penanganan yang lambat, maka disarankan agar pemerintah lebih serius dalam membangun sarana dan prasarana dasar seperti di fasilitasnya sarana transportasi sungai dengan sarana transportasi milik pemerintah agar biaya lebih murah sementara menunggu akses transportasi darat dibangun, dibangunnya tower-tower BTS yang baru akan meningkatkan pendanaan karena BBM yang mahal bahkan terkadang langka maka disarankan supaya pembangunan tower BTS yang baru juga bisa sambil memanfaatkan energi tenaga surya agar lebih menghemat bahan bakar minyak, masyarakat masih terkendala pada biaya ketika ingin melanjutkan sekolah ke tahap perguruan tinggi maka disarankan agar diberikannya beasiswa khusus bagi masyarakat di wilayah perbatasan, untuk menagani sarana kesehatan disarankan dibangunnya sarana Rumah Sakit dan dilengkapi peralatan medis yang dibutuhkan, untuk membangun sumber daya masyarakat disarankan agar difasilitasinya sarana kebutuhan dasar lainnya seperti listrik, pasar dan sarana kegiatan pertanian untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan masyarakat.
4. Mengingat masyarakat tidak puas dengan perkembangan dan penanganan yang ada, maka untuk menghindari terjadinya eksodus masyarakat seharusnya pemerintah lebih serius dalam menangani keterbatasan sarana dan prasarana wilayah perbatasan di Kecamatan Long Apari dan walaupun Mahakam Ulu

masih merupakan DOB semestinya sambil pembangunan berjalan pemerintah memiliki alternatif lain agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Seperti belum adanya sarana listrik, maka disarankan agar pemerintah membagikan pembangkit energi listrik tenaga surya pada masyarakat yang kurang mampu sambil menunggu terealisasinya jaringan PLN, dan lain sebagainya pada aspek-aspek lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Anselm, Strauss dan Juliet, Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianta, Aziz. 2010. *Perkembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia*, Semarang: Pena Mas.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. 2014a. *Kalimantan Timur Dalam Angka*. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
- _____. 2014b. *Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka*. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
- _____. 2014c. *Kecamatan Long Apari Dalam Angka*. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
- [BPPD] Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 2014a. *Peta Wilayah Perbatasan*. Ujoh Bilang; BPPD kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014b. *Master Plan Wilayah Perbatasan kabupaten Mahakam Ulu*. Ujoh Bilang: BPPD Kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014c. *Monografi Kecamatan Long Apari*. Ujoh Bilang: BPPD Kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014d. *Kondisi Sarana Komunikasi Menurut Desa*. Ujoh Bilang: BPPD Kabupaten Mahakam Ulu.
- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 2014a. *Persentase Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu per Kecamatan*. Ujoh Bilang; Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014b. *Pendidikan*. Ujoh Bilang: Bappeda kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014c. *Rencana Sektor Perkembangan Wilayah Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu*. Ujoh Bilang: Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- _____. 2014d. *Potensi Wisata Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu*. Ujoh Bilang: Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- Citrawijaya, Supoduto. 2006. *Kompi X di Rimba Siglayan (Konfrontasi dengan Malaysia)*, Jakarta: Kompas.
- Cooper, Schindler. 2003. *Theoris and concepts*. Oxpord: Oxford University Press.
- Djamrah, S.B.,2006. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi II*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Jakarta: UNHAINDO media & offset.
- Fathoni. 2006. *Tekhnik Penelitian Kualitataif dan Kuantitatif*. Jakarta: Media Pustaka.
- Haba, John. 2008. *Berkenalan dengan Wilayah Perbatasan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Haditono, Rahayu, Siti. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Mandala.
- Hasan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Yofyakarta: Erlangga.
- Hornby, Cowie, dan Gimson. 1986. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Lexy, J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Milles, B. Matthew, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- M, Listiyah. 1996. *Memaknai Perbatasan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Sejahtera.
- Maryam, Green NA; Malcolm, Shaw; Strake; dan Tsani, Burhan. 2012. *Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muta'ali, Lutfi; Marwasta, Djaka; Joko, Christanto. 2014. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muljana, B.S. 2001. *Tekhnis Membangun Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi I)*. Surabaya: CV Mandar Maju.
- Muljana, B.S. 2001. *Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Sejahtera.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Muhammad, Syukuri, Albani. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Sumatera: UIN Sumatera Utara.
- Patton, Michael, Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Podo, Siswo, dkk. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi* . Bandung: Remaja Resdakarya.
- Ratnawati, Tri. 2006. *Strategi Perkembangan dan Kemampuan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohidi, Rohindi, Tjepjep. 1992. *Analisis Data Qualitatif*. Jakarta: UI-Press.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suroyo. 2005. *Wilayah Perbatasan Internasional*. Jakarta: Media Pustaka.
- Silalahi, Gabriel. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: Citra Media.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Soeprihato, John. 2009. *Penilaian Konejra dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- S, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2004. *Metologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sutaat. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara*. Jakarta: Puslitbang Kesos.
- Sudjana. 2001. *Analisis deskriptif Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Mandala.
- Simamora, Henry. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi I)*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Usman, Husain; Akbar, Setiady. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Mandala.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kalimantan Timur.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan utara sebagai Pemekaran dari Kalimantan Timur.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Sumber Internet

<http://Www.Regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/05/05bataswilayah>.

<http://Www.bbc.co.uk/Indonesia/BeritaIndonesiaKalimantanUtara>.

<http://Www.Tempo.com/Indonesia-Malaysia> Sepakat Buka Pos Lintas Batas

<http://Www.Kompas.com/400-an> warga RI di Nunukan punya KTP Malaysia

<http://Www.KaltimProv.co.id/Potensi-mahakam-ulu>

<http://Www.Kompas.com/Warga> di desa perbatasan Indonesia-Malaysia tidak mendapat sinyal telekomunikasi.

<http://Www.belanegarari.com/LostInLongApari>.

<http://Www.m.republika.co.id/Telkomsel> merah putih jangkau tiga kecamatan perbatasan Malaysia-Kaltim

<http://Www.Kompas.com/Tidak> di perhatikan pemerintah 10 desa di Kalimantan Timur akan bergabung dengan Malaysia

<http://id.m.Wikipedia.org/Profil> Propinsi Kalimantan Timur